



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **A. IRMAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **198557**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **5.090.000.000**

1. Tanah Seluas 7.500 m2 di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 10.965 m2 di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
3. Tanah Seluas 5.002 m2 di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 8.618 m2 di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
6. Bangunan Seluas 163 m2 di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
7. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Bangunan Seluas 163 m2 di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
9. Bangunan Seluas 84 m2 di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
10. Bangunan Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , Rp. 850.000.000
11. Tanah Seluas 70 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI



Rp. 400.000.000

12. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 224.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

2. MOTOR, YAMAHA AEROX BEBEK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

3. MOTOR, YAMAHA SCOOTER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 120.600.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 26.650.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 5.461.250.000

**III. HUTANG**

Rp. 497.589.282

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 4.963.660.718

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : RINA ZURIATI
- Jabatan : SEKRETARIS
- NHK : 486682

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>335.000.000</b>
1. Tanah Seluas 1.006 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , Rp. 335.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>59.000.000</b>
1. MOBIL, NISAN X-TRAIL 2.5 ST AT Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 59.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>---</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>22.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>416.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>185.278.705</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>230.721.295</b>

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DEDDY SUARMAN**
2. Jabatan : **KEPALA UPT**
3. NHK : **747903**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>175.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>54.500.000</b>
1. MOTOR, YAMAHA 28D(MIO/AL115S)/A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
2. MOTOR, HONDA L1K02Q33L1A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000		
3. MOTOR, HONDA F1C02N46L0A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>35.550.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>107.600.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>372.650.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>372.650.000</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ANITA KRISTIANTI  
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET  
3. NHK : 484248

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	56.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	81.000.000

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 81.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : NURHILMI LABALADO
- Jabatan** : KEPALA SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
- NHK** : 901728

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	175.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	175.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	72.000.000
<b>D. SURAT BERTHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	240.076.101
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	487.076.101
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	127.638.227
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	359.437.874

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RIAN DHARMAWAN
2. Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
3. NHK : 486768

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>200.000.000</b>
1. Tanah Seluas 1.138 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>390.800.000</b>
1. MOBIL, INNOVA MINIBUS Tahun 2006, WARISAN Rp. 88.000.000		
2. LAINNYA, SEPEDA LIPAT AVAND CHESTER X SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000		
3. MOBIL, HONDA MINIBUS/WRV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>64.200.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>32.981.331</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>687.981.331</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>633.619.178</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>54.362.153</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUTANZAH FATKHURAHMAN
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN
3. NHK : 900358

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	---
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	28.500.000
1. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2012, HIBAH TANPA AKTA	Rp.	3.500.000
2. MOBIL, JEEP WILYS Tahun 1970, HASIL SENDIRI	Rp.	25.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	27.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	7.090.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	62.590.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	157.311.927
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-94.721.927

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : AGUSSALIM ANDI MASSE
- Jabatan** : KEPALA SUB BAGIAN PELAKSANAAN
- NHK** : 981235

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>290.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.500.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
Sub Total	<b>Rp.</b>	<b>297.500.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>147.500.000</b>

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUPARDIN KAHAR
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
3. NHK : 488093

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>790.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 407 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , Rp. 550.000.000		
2. Tanah Seluas 343 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
3. Bangunan Seluas 45 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
4. Tanah Seluas 8.000 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, Rp. 30.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERTAHAGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>43.500.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>842.500.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>84.082.050</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>758.417.950</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
**UNIT KERJA** : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMAD TAUFIK
2. Jabatan : SUB KOORDINATOR AKUNTANSI PELAPORAN
3. NHK : 219446

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI	Rp.	100.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	25.000.000
<b>D. SURAT BERTHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	209.078.422
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	334.078.422

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 334.078.422

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.